

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA DI TPS 1 DESA
TEMIANG DAN TPS 1 DESA KEROYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH 2024**

Linda Maseta¹, Mareta Suwartini², Titi Darmi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

lindamaseta244@gmail.com¹, maretasuwartini@gmail.com², titidarmi@umb.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Temiang dan TPS 1 Desa Keroya, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di TPS 1 Desa Temiang mencapai 69,15%, dan di TPS 1 Desa Keroya 69,70%, dengan angka golput sekitar 30%. Faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi meliputi apatisme masyarakat, ketidakpercayaan terhadap kandidat akibat isu korupsi, kerumitan prosedur administratif, kurangnya edukasi politik, serta kendala waktu karena pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menyoroti pentingnya peningkatan edukasi politik, perbaikan prosedur administratif, dan strategi sosialisasi yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan mewujudkan partisipasi yang lebih luas dalam pemilu mendatang.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah, Golongan Putih.

Abstract

This study aims to analyze the level of community participation in the 2024 regional elections at polling station 1 of Temiang Village and polling station 1 of Keroya Village, Bengkulu Tengah Regency, and identify the factors that cause low participation. The results showed that the participation rate at polling station 1 Temiang Village reached 69.15%, and at polling station 1 Keroya Village 69.70%, with an abstention rate of around 30%. Factors causing low

participation include community apathy, distrust of candidates due to corruption issues, the complexity of administrative procedures, lack of political education, and time constraints due to work. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Research informants were selected based on certain criteria relevant to the research objectives. The results highlight the importance of increased political education, improved administrative procedures, and inclusive socialization strategies to increase community participation in Pilkada. These measures are expected to strengthen people's trust in the democratic process and realize wider participation in future elections.

Keywords: *Community Participation, Local Elections, White Groups.*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam proses pilkada untuk kemajuan suatu daerah di masa yang akan mendatang. (Akbar et al., 2018) Partisipatif dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan publik sangat bergantung pada keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut (Affan, 2021) menyatakan Partisipasi masyarakat dalam proses pilkada memiliki peran penting untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah dan keberhasilan pembangunan di daerahnya. Dengan ikut berpartisipasi masyarakat ikut menyalurkan hak suaranya dan juga menunjukkan bentuk kepedulian dan dukungan terhadap calon pemimpin yang dipercaya mampu membawa perubahan positif.

Dalam pelaksanaan pilkada, partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui tiga tindakan: menggunakan hak suara, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan berpartisipasi dalam kampanye (Mahmud, 2021). Sebagaimana di nyatkan oleh (Ramadhanil et al., 2015) “Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat berupa Memberikan suara sebagai pemilih” Tindakan ini merupakan bentuk nyata dari peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi, di mana setiap suara yang diberikan menjadi elemen penting dalam menentukan pemimpin yang akan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Melalui keikutsertaan ini, masyarakat tidak hanya menyalurkan hak politiknya tetapi juga turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang representatif dan berdaya guna.

Sherry Arnstein (1969) mendefinisikan partisipasi sendiri sebagai istilah kategoris untuk kekuasaan masyarakat. Dia mengatakan partisipasi adalah pembagian kekuasaan yang memungkinkan masyarakat yang tidak terlibat dalam politik atau ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Dengan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sama dengan kekuasaan masyarakat. Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. memposisikan masyarakat sebagai pemilih, bukan politisi. Pemilihan langsung kepala daerah yang dilakukan secara demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui suara mereka. (Endrianto, 2021)

Pemilihan Kepala Daerah, atau Pilkada, sebenarnya merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. (sutrisno, 2017). Menurut (Syarifuddin & Hasanah, 2020), pilkada memiliki tujuan utama untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengikuti keinginan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan langsung adalah salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di daerah. Pelaksanaan Pilkada secara langsung masih menjadi diskursus penting, sebab apakah Pilkada berdampak positif atau negatif terhadap pengembangan demokrasi. (Meyliana & Erowati, 2020). Sebagaimana dinyatakan oleh Prihatmoko (2005), pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, secara langsung merupakan pengembalian hak konstitusional untuk memilih pemimpin lokal. Oleh karena itu, rakyat memiliki kesempatan dan kekuatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa gangguan, sama seperti mereka memilih presiden dan anggota legislatif.

Pemilihan kepala daerah didukung oleh masyarakat yang terlibat dalam politik. Dalam demokrasi ideal, ukuran paling penting dari pemilihan kepala daerah adalah tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa orang memahami pentingnya masalah politik dan ingin proses demokrasi yang adil, sedangkan tingkat partisipasi yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli dengan masalah negara. (Endrianto, 2021). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin jelas pemahaman masyarakat tentang partisipasi mereka dalam kegiatan nasional. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik yang rendah biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami atau tidak ingin memahami masalah yang ada dalam kegiatan nasional. (Putri & Putri, 2022)

Kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan pemilu adalah faktor utama yang

memengaruhi partisipasi dalam pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu harus dipertahankan dan ditingkatkan karena menunjukkan pelaksanaan demokrasi yang efektif (Awat Amir et al., 2024). Dalam penyelenggaraan pilkada di setiap daerah, dapat ditemukan faktor-faktor yang mengurangi partisipasi politik masyarakat, terutama dalam memberikan suaranya dalam pilkada (Dewi et al., 2022). Rendahnya Partisipasi ini disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan golput.

Golput adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang peduli dengan politik tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan. (Arif & Mulyana, 2020). Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa orang lebih mementingkan kebutuhan ekonomi mereka—memilih untuk bekerja—daripada datang ke TPS untuk memberikan suaranya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah adalah hasil dari apatis masyarakat, yang menyebabkan mereka percaya bahwa pemilihan kepala daerah ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. (Septianingrum et al., 2023)

Menurut (Arini, 2024) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 sebesar 68,1% secara nasional Angka tersebut diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan dan turun secara signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang tidak memilih atau tidak berpartisipasi secara aktif dalam politik, Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti sikap politik masyarakat, jarak waktu antara pemilu dan pilkada yang terlalu dekat, serta hambatan aksesibilitas pemilih ke TPS.

Kegiatan ini dilaksanakan di TPS 1 Desa Temiang dan TPS 1 Desa Keroya, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang menunjukkan pola partisipasi masyarakat yang hampir serupa. Di TPS 1 Desa Temiang, menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 69,15%. Sementara itu, di TPS 1 Desa Keroya, dengan tingkat partisipasi sebesar 69,70%. Kendati demikian, angka golput di kedua TPS masih cukup tinggi, yaitu sebesar 30,85% di Desa Temiang dan 30,38% di Desa Keroya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga pemilih di kedua desa tidak hadir untuk menggunakan hak pilih mereka.

Angka golput yang signifikan ini mencerminkan adanya tantangan yang kompleks dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya kepercayaan

terhadap calon kepala daerah, kekecewaan terhadap janji-janji politik yang tidak terealisasi, serta kerumitan prosedur administratif bagi pemilih yang ingin pindah lokasi memilih menjadi penyebab utama. Selain itu, kesibukan pekerjaan, terutama bagi warga yang bekerja di luar daerah, turut membatasi waktu untuk hadir di TPS. Sikap apatis terhadap dampak Pilkada pada kehidupan sehari-hari juga memperparah kondisi ini, terutama di kalangan pemilih yang merasa bahwa pemilu tidak membawa perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Temiang dan TPS 1 Desa Keroya, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab golput.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Temiang dan TPS 1 Desa Keroya, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada data yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, sebagaimana tercermin dari tingginya angka golput di kedua TPS.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi sosial, budaya, dan teknis di lokasi penelitian yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan dengan 10 informan yang dipilih secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memastikan bahwa informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kriteria pemilihan informan meliputi: Informan merupakan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Berusia minimal 17 tahun Informan telah memiliki hak pilih berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Domisili di Desa Temiang atau Desa Keroya Informan merupakan warga yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 di masing-masing desa. Beragam tingkat pendidikan Informan berasal dari latar belakang pendidikan yang bervariasi (SD hingga SMA) untuk mendapatkan pandangan yang beragam. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara dalam Pilkada

Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Temiang dan TPS 1 Desa Keroya, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua TPS ini memiliki karakteristik yang mencerminkan pengaruh kondisi sosial budaya masyarakat terhadap tingkat partisipasi pemilih. Di Desa Temiang, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dengan pola kehidupan agraris yang dominan. Meskipun akses fisik ke TPS tidak menjadi kendala, rendahnya partisipasi masyarakat lebih disebabkan oleh sikap apatis terhadap Pilkada, yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Desa Keroya memiliki populasi yang lebih heterogen, dengan banyak penduduk yang bekerja di luar daerah bahkan hingga ke luar negeri. Tingginya mobilitas penduduk dan kesibukan pekerjaan menjadi faktor signifikan yang memengaruhi tingkat kehadiran pemilih di TPS.

Tingkat partisipasi masyarakat di kedua TPS mencerminkan pola yang hampir serupa. Di TPS 1 Desa Temiang, dari 470 Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 325 warga hadir memberikan suara, dengan jumlah warga yang tidak hadir yaitu 145 menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 69,15%. Sementara itu, di TPS 1 Desa Keroya, dari 293 DPT, sebanyak 204 warga menggunakan hak pilihnya, dengan jumlah warga yang tidak hadir yaitu 89 dengan tingkat partisipasi sebesar 69,70%. Kendati demikian, angka golput di kedua TPS masih cukup tinggi, yaitu sebesar 30,85% di Desa Temiang dan 30,38% di Desa Keroya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga pemilih di kedua desa tidak hadir untuk menggunakan hak pilih mereka yang mencerminkan adanya tantangan struktural dan sosial yang memengaruhi perilaku memilih.

Secara sosial budaya, masyarakat di Desa Temiang dan Desa Keroya menghadapi tantangan dalam memahami pentingnya partisipasi politik. Di Desa Temiang, kehidupan masyarakat cenderung homogen, namun sosialisasi politik yang kurang efektif menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap peran Pilkada dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal ini diperparah oleh apatisisme, di mana sebagian warga merasa bahwa hasil Pilkada tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka. Di sisi lain, Desa Keroya menunjukkan dinamika sosial yang lebih kompleks akibat tingginya mobilitas penduduk. Banyak warga yang bekerja di luar daerah kesulitan untuk menggunakan hak pilih mereka, terutama karena kendala administratif terkait prosedur pindah memilih.

Faktor lain yang turut menyumbang rendahnya partisipasi masyarakat adalah rendahnya kepercayaan terhadap calon kepala daerah. Beberapa warga mengaku skeptis terhadap janji-janji politik yang dianggap tidak realistis atau tidak terealisasi pada periode sebelumnya. Selain itu, skandal politik yang melibatkan calon tertentu juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Di sisi lain, pemilih pemula sering kali merasa bingung karena kurangnya informasi mengenai tata cara pemilihan, profil calon, dan program kerja yang ditawarkan. Kesenjangan informasi ini menjadi tantangan serius yang memengaruhi tingkat partisipasi politik generasi muda.

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi politik dan strategi sosialisasi yang lebih inklusif untuk mengatasi apatisme dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Selain itu, penyederhanaan prosedur administratif, khususnya bagi pemilih yang bekerja di luar daerah, perlu menjadi perhatian utama untuk memastikan inklusivitas pemilu. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada mendatang dapat meningkat, sehingga legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal semakin kuat.

Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Penulis melakukan wawancara kepada warga desa temiang dan desa keroya kabupaten bengkulu tengah mengenai alasan mereka melakukan golput

Informan pertama yang berinisial NH, laki-laki beragama agama Islam, degan pendidikan terakhir SD, dan lahir di Temiang tahun 1980, tinggal di Desa Temiang. Wawancara tentang penyebab golput Dia menyatakan,

"Menurut saya, hasil Pilkada tidak akan berpengaruh besar pada kehidupan saya. Pemimpin baru atau lama, hidup saya tetap sama."

Masyarakat kurang percaya pada dampak Pilkada terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian warga berpendapat bahwa terpilihnya pemimpin baru atau kembalinya pemimpin lama tidak membawa perubahan yang signifikan. Ini menunjukkan sikap apatis, yang mungkin disebabkan oleh pengalaman sebelumnya di mana janji-janji kampanye tidak terpenuhi. Selain itu, skeptisisme ini diperkuat oleh kurangnya transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan program pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa calon pemimpin harus menggunakan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka tidak hanya harus menyampaikan tujuan dan visi yang meyakinkan, tetapi mereka juga harus dapat menunjukkan

bagaimana program yang mereka kampanyekan berdampak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik juga penting untuk mengatasi ketidakpedulian ini. Dengan cara ini, masyarakat dapat kembali percaya bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana pembangunan akan berjalan. Kepercayaan ini dapat dipulihkan dalam Pilkada mendatang.

Informan yang kedua, berinisial DP, laki-laki beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMP, lahir di Temiang pada tahun 1970, tinggal di Desa Temiang. Dengan hasil wawancara yaitu:

“Saya membaca di berita bahwa ada calon kepala daerah terlibat dalam korupsi, bahkan salah satu calon terkena OTT sebelum Pilkada. Ini menunjukkan bahwa mereka berpikir untuk diri mereka sendiri dari pada untuk rakyat. Dengan cara apa kita dapat mempercayai orang-orang seperti itu? Saya lebih memilih untuk tidak memilih dari pada mendukung orang yang mungkin hanya memperburuk keadaan di masa depan.”

Salah satu komponen utama yang mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para kandidat dalam Pilkada 2024 adalah skandal politik dan korupsi. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabat publik dan calon kepala daerah sangat berdampak negatif. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kandidat hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi daripada untuk membantu masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh pola "politik transaksional" yang terus-menerus, di mana kepentingan kelompok tertentu yang mendukung mereka secara moneter sering kali lebih penting daripada kepentingan rakyat. Akibatnya, masyarakat tidak percaya bahwa suara mereka dapat membawa perubahan yang nyata. Bagi sebagian besar orang, janji-janji kampanye hanyalah retorika kosong yang sulit dilaksanakan, sehingga mereka tidak peduli dengan proses Pilkada. Selain itu, pemberitaan tentang pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi membuat masyarakat percaya bahwa tidak ada kandidat yang dapat dipercaya. Mereka khawatir bahwa memilih kandidat tertentu berarti mendukung sistem yang tidak berfungsi. Sebagian orang memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak berpartisipasi dalam Pilkada karena perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan.

Informan ketiga, berinisial EA, laki-laki beragama Islam dengan pendidikan terakhir SMA, serta lahir di Temiang pada tahun 2002, dan tinggal di Desa Temiang. Dia mengemukakan sebagai berikut:

"Prosedur pindah memilih terlalu rumit. Saya bekerja di kota lain, dan saat Pilkada, saya tidak sempat pulang untuk mencoblos."

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada adalah kerumitan prosedur administratif bagi pemilih yang ingin pindah lokasi pencoblosan. Banyak warga, khususnya yang bekerja di luar daerah, mengaku kesulitan untuk mengurus dokumen pindah memilih. Proses yang panjang dan kurangnya sosialisasi terkait mekanisme ini menjadi hambatan utama. Akibatnya, sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak praktis atau tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dari penyelenggara pemilu dalam mempermudah proses pindah memilih, seperti memperkenalkan sistem yang lebih fleksibel dan berbasis digital. Hal ini dapat membantu para pemilih yang berada di luar daerah untuk tetap dapat berpartisipasi dalam Pilkada tanpa harus menghadapi kendala administratif yang membebani. Dengan langkah ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak politiknya dengan lebih mudah.

Informan keempat, yang berinisial RP, perempuan, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA, serta lahir di Keroya pada tahun 2001, dan tinggal di Desa Keroya. Dalam wawancara, dia mengemukakan:

"Saat Pilkada berlangsung, saya sedang bekerja di luar daerah. Saya tidak diizinkan mengambil cuti karena hari itu bukan hari libur nasional. Kalau saya memaksa libur, saya khawatir akan kehilangan pekerjaan."

Salah satu alasan utama warga tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada adalah keterbatasan waktu yang disebabkan oleh kewajiban pekerjaan. Banyak pekerja, terutama yang berada di luar daerah, menghadapi situasi di mana mereka tidak diizinkan mengambil cuti karena Pilkada bukan hari libur nasional. Dalam kasus ini, rasa takut kehilangan pekerjaan menjadi faktor penentu bagi mereka untuk tidak kembali ke tempat tinggal asal guna mencoblos.

Situasi ini mencerminkan adanya keterbatasan fleksibilitas dalam dunia kerja bagi masyarakat kelas pekerja, yang sering kali mengutamakan stabilitas ekonomi dibandingkan partisipasi dalam proses demokrasi. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih mendukung, seperti menetapkan Pilkada sebagai hari libur nasional atau memberikan

kelonggaran bagi pekerja untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus mengorbankan pekerjaan. Lebih jauh, hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk mencari solusi yang memungkinkan masyarakat tetap bisa berpartisipasi, misalnya dengan mempermudah proses pindah memilih bagi mereka yang bekerja di luar daerah. Jika tidak diatasi, masalah ini berpotensi terus mengurangi angka partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi legitimasi proses demokrasi itu sendiri.

Informan yang kelima berinisial MS, laki-laki agama Islam, pendidikan terakhir SMA, lahir di Keroya pada tahun 1999, beralamat di desa Keroya. Berikut hasil wawancaranya:

"Saya bekerja di Malaysia sebagai buruh perkebunan. Saat Pilkada berlangsung, saya tidak bisa pulang karena jadwal kerja saya padat, dan ongkos untuk kembali ke Indonesia terlalu mahal. Saya memutuskan untuk tidak ikut memilih karena tidak ada cara lain yang memungkinkan."

Ketidakhadiran warga yang bekerja di luar negeri dalam Pilkada mencerminkan tantangan besar dalam memastikan inklusivitas pemilu bagi seluruh warga negara, terutama yang berada di luar wilayah Indonesia. Informan menyebutkan bahwa keterbatasan waktu kerja, biaya perjalanan yang tinggi menjadi hambatan utama dalam menggunakan hak pilih mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilu bagi warga negara yang bekerja atau tinggal di luar negeri masih kurang memadai. Kendala seperti tidak tersedianya metode pemilihan alternatif, seperti pemungutan suara melalui pos atau secara daring, semakin memperkuat ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi. Akibatnya, kelompok ini sering kali terpinggirkan dari proses demokrasi, meskipun mereka memiliki hak politik yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, penyelenggara pemilu perlu menyediakan opsi yang lebih fleksibel bagi warga negara di luar negeri. Misalnya, dengan memperluas akses pemilu melalui konsulat atau kedutaan besar, meningkatkan sosialisasi terkait mekanisme memilih dari luar negeri, dan mempertimbangkan metode digital yang aman dan terpercaya. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi, dapat ikut menentukan arah pemerintahan yang demokratis.

Informan keenam berinisial AD, laki laki agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tanggal lahir di Temiang lahir pada tahun 2006, beralamat di Desa temaing. Berikut hasil wawancaranya:

"Saya sebenarnya ingin memilih, tapi saya bingung. Gimana cara memilih, siapa calon-

calonnya, dan apa yang harus saya perhatikan? Tidak ada yang ngajarin."

Adanya kesenjangan dalam sosialisasi pemilu, khususnya kepada kelompok pemilih pemula. Banyak dari mereka merasa tidak cukup mendapat bimbingan tentang mekanisme pemilu, seperti tata cara memilih, mengenal calon, atau memahami pentingnya partisipasi mereka dalam menentukan pemimpin daerah. Situasi ini menyoroti pentingnya peran pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi politik yang menyeluruh dan mudah diakses, terutama bagi generasi muda. Kurangnya akses terhadap informasi dan bimbingan tidak hanya membuat pemilih pemula bingung, tetapi juga mengurangi rasa percaya diri mereka untuk terlibat dalam proses demokrasi. Selain itu, kondisi ini memperlihatkan perlunya inovasi dalam metode penyampaian informasi, misalnya melalui media sosial atau platform digital yang lebih akrab bagi pemilih muda. Upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya hak pilih, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai calon dan program kerja yang ditawarkan. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, risiko rendahnya partisipasi pemilih pemula akan terus meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan demokrasi di masa depan. Dengan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan edukasi politik generasi muda, penyelenggara pemilu dapat memastikan inklusivitas dan legitimasi yang lebih kuat dalam setiap proses pemilu.

Informan yang ketujuh, berinisial AE, laki-laki agama Islam, pendidikan terakhir SD, lahir di Temiang tahun 1970, beralamat di Desa Temiang. Berikut hasil wawancaranya:

"Partai politik hanya mengusung calon-calon yang sudah sering kita lihat, dan tidak ada yang baru atau membawa perubahan. Saya pikir lebih baik saya tidak memilih, karena saya yakin hasilnya tetap sama."

Rasa ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, khususnya dalam konteks Pilkada. Pemilih merasa bahwa calon-calon yang diajukan oleh partai politik tidak membawa solusi atau pembaruan yang diinginkan masyarakat. Mereka merasa terjebak dalam siklus yang sama, di mana calon yang dipilih hanya berputar di kalangan yang itu-itu saja, tanpa ada figur baru yang muncul dengan visi yang benar-benar berbeda. Rasa frustrasi ini muncul karena pemilih tidak melihat adanya perubahan yang berarti dari setiap periode Pilkada. Calon-calon yang ada sering kali dianggap tidak lebih dari sekadar pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan janji-janji yang serupa tanpa adanya realisasi yang memadai. Pemilih

merasa bahwa hasil akhirnya akan selalu sama: janji-janji yang tidak terpenuhi, dan masalah yang sama terus berulang tanpa ada perbaikan yang signifikan. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap partai politik juga semakin menguat. Banyak pemilih yang merasa bahwa keputusan partai dalam mengusung calon tidak didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi rakyat, tetapi lebih pada kepentingan politik tertentu. Calon-calon yang diusung sering kali dipandang sebagai figur yang lebih peduli pada kekuasaan pribadi atau kelompok, bukan untuk memperbaiki kondisi daerah dan memenuhi harapan masyarakat. Hal ini membuat banyak pemilih merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan apapun, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali.

Informan kedelapan, berinisial UD, lelaki agama Islam, pendidikan terakhir SD, lahir di Keroya pada tahun 1962, beralamat di Desa Keroya. Ia menyatakan sebagai berikut:

"Saya sibuk bekerja. Pilkada tidak memberi pengaruh langsung ke hidup saya. Mau siapa pun yang menang, saya tetap harus kerja keras."

Seorang pemilih yang merasa bahwa Pilkada tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Bagi pemilih seperti ini, fokus utama mereka adalah kestabilan ekonomi dan kelangsungan pekerjaan, yang mereka anggap lebih penting daripada proses politik yang sedang berlangsung. Meskipun Pilkada adalah bagian dari demokrasi, mereka merasa bahwa hasilnya tidak akan mengubah kondisi hidup mereka secara signifikan. Keputusan politik sering kali dianggap tidak berdampak langsung pada aspek-aspek kehidupan yang lebih bersifat pribadi dan praktis, seperti pekerjaan dan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan adanya jarak antara politik lokal dan kehidupan sehari-hari banyak masyarakat, terutama mereka yang berada di sektor pekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang lebih fokus pada pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari cenderung merasa Pilkada atau hasil pemilihan tidak relevan bagi mereka. Mereka merasa bahwa meskipun ada perubahan kepemimpinan, tuntutan untuk bekerja keras dan mencari nafkah tetap tidak berubah. Ketika kondisi kehidupan sehari-hari terasa stabil, perhatian terhadap proses politik menjadi berkurang, karena mereka merasa bahwa perubahan di tingkat pemerintahan tidak akan memengaruhi kesejahteraan mereka secara langsung. Lebih jauh lagi, pernyataan ini mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi politik dari sebagian masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh proses politik. Ketidakpedulian terhadap Pilkada mungkin juga berasal dari pengalaman negatif di masa lalu, di mana janji-janji politik yang diberikan oleh calon kepala

daerah tidak terbukti atau tidak memberikan perubahan nyata. Bagi mereka, Pilkada hanyalah sebuah rutinitas tahunan yang tidak membawa perubahan signifikan. Oleh karena itu, penyelenggara Pilkada perlu mempertimbangkan bagaimana menarik kembali perhatian masyarakat dengan menghadirkan calon yang mampu menawarkan kebijakan yang lebih relevan dan dapat langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi.

Informan yang kesembilan, berinisial AS, laki-laki agama Islam, pendidikan terakhir SMA, lahir di Keroya pada tahun 2005 beralamat di Desa Keroya. Berikut hasil wawancaranya:

"Jujur saya tidak terlalu peduli sama Pilkada atau politik. Rasanya ribet, dan saya lebih suka fokus sama kegiatan sehari-hari."

Sikap apatis terhadap politik, yang sering kali muncul pada sebagian orang yang merasa bahwa urusan politik terlalu rumit dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Bagi individu seperti ini, politik dianggap sebagai hal yang jauh dari keseharian mereka, dan lebih memilih untuk menghindari perdebatan atau aktivitas yang berhubungan dengan Pilkada. Mereka cenderung tidak merasa terhubung dengan proses politik, karena merasa tidak ada manfaat langsung yang dapat mereka rasakan. Sikap apatis ini sering kali juga disebabkan oleh ketidakpahaman atau ketidakmampuan untuk melihat kaitan antara kebijakan politik dengan kehidupan sehari-hari mereka. Proses Pilkada yang sering dianggap kompleks dan penuh intrik bisa membuat sebagian orang merasa kesulitan untuk memahami bagaimana calon yang dipilih nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi yang efektif tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada atau bagaimana memilih calon yang tepat bisa berdampak pada kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Selain itu, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan di masyarakat untuk lebih memprioritaskan kegiatan yang lebih langsung berdampak pada kesejahteraan pribadi, seperti pekerjaan atau kegiatan sosial lainnya. Bagi mereka, politik dianggap sebagai urusan yang memakan waktu dan energi tanpa memberikan dampak nyata.

Informan yang kesepuluh, berinisial DS, laki-laki agama Islam, pendidikan terakhir SMA, lahir di Keroya pada tahun 2001 beralamat di Desa Keroya. Berikut hasil wawancaranya:

"Saya sebenarnya ingin memilih, tapi saya merasa tidak cukup paham tentang calon-calon yang ada dan program-programnya. Selama ini, tidak ada informasi yang jelas atau

sosialisasi yang memadai dari pihak yang berwenang."

Adanya masyarakat menunjukkan adanya ketidakpahaman atau kebingungan terkait calon dan program yang mereka tawarkan dalam Pilkada. Hal ini sering terjadi pada pemilih yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kandidat atau kebijakan mereka. Sosialisasi yang tidak memadai atau kurangnya akses ke informasi yang jelas tentang calon dan program-program mereka menyebabkan pemilih merasa tidak yakin untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketika tidak ada penjelasan yang memadai, pemilih merasa bingung dan akhirnya memilih untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan sama sekali. Selain itu, ketergantungan pada media massa atau informasi dari orang lain seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif atau komprehensif tentang calon yang ada. Dalam beberapa kasus, informasi yang beredar di media atau yang didengar dari orang sekitar mungkin terdistorsi atau dipengaruhi oleh opini subjektif, yang membuat pemilih semakin ragu untuk membuat pilihan yang tepat. Tanpa adanya sumber informasi yang dapat dipercaya dan mudah diakses, pemilih merasa terjebak dalam ketidakpastian. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran sosialisasi yang jelas dan transparan dari pihak penyelenggara Pilkada untuk memberikan pemahaman yang baik bagi semua kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Temiang dan TPS 1 Desa Keroya, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tingkat partisipasi masyarakat di kedua lokasi menunjukkan pola yang hampir sama, dengan partisipasi masing-masing sebesar 69,15% di Desa Temiang dan 69,70% di Desa Keroya. Namun, angka golput masih tinggi, yaitu sekitar 30%, yang mencerminkan berbagai tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi antara lain adalah sikap apatis sebagian masyarakat yang merasa Pilkada tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Ketidakpercayaan pada kandidat juga menjadi masalah, di mana kasus korupsi dan janji politik yang tidak terealisasi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah. Selain itu, kesulitan administratif seperti prosedur pindah memilih yang rumit menjadi hambatan, terutama bagi pemilih yang bekerja di luar daerah.

Minimnya edukasi politik juga menjadi kendala, di mana pemilih pemula sering kali

kebingungan karena kurangnya sosialisasi terkait tata cara memilih dan profil calon. Keterbatasan waktu kerja semakin memperparah situasi ini, karena banyak pemilih tidak bisa hadir di TPS akibat tidak mendapatkan izin cuti kerja, terutama bagi yang bekerja di sektor swasta atau di luar negeri.

Untuk meningkatkan partisipasi di masa mendatang, disarankan adanya edukasi politik yang lebih inklusif, perbaikan prosedur administratif, serta strategi sosialisasi yang lebih efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan mendorong inklusivitas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 131.
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 381–395. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406>
- Arini, N. (2024). *FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA*.
- Awat Amir, Z., Izzatusholekha, I., Salam, R., & Andriansyah, A. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.178>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Endrianto, T. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Kota Palembang Tahun 2018. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 206–214. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2260%0Ahttps://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/2260/1116>

- Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud, T. A. (2021). Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 82–91. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1115>
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 3747–3756. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>
- Ramadhanil, F., Junaid, V., & Ibrohim. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf>
- Septianingrum, A., Rofieq, A., Kunci, K., Kpu, S., & Kepala Daerah, P. (2023). Strategi Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Kota Bekasi 2024 Strategies To Reduce the Number of Abstentions in the 2024 Bekasi Local Election. *Jurnal Kybernan*, 14(2), 13–23.
- sutrisno, cucu. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Syarifuddin, & Hasanah, S. (2020). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics*, 4(2), 252–269. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>